

BAB I

STUDI TEMATIK HADIS-HADIS TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kata “Etika” selalu saja muncul di setiap tindakan dalam kehidupan sosial yang biasa disamaratakan dengan suatu tindakan yang baik dan metode-metode bertindak baik pada diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Pola hidup serta tata cara bertindak baik selalu diturunkan secara turun temurun dari generasi. Pola hidup dan metode-metode tindakan yang baik di sini selanjutnya dibekukan pada sebuah aturan dan norma serta kaidah yang dapat disebarluaskan baik dari mulut ke mulut ataupun berbentuk tulisan kepada orang lain, kaidah dan norma pada dasarnya mencakup pada etika yang membahas tentang batasan dalam setiap tindakan terkait apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus dihindarkan.¹

Etika sangat sering dikaitkan dengan kata moral karena pada dasarnya kedua kata tersebut sama-sama membahas tentang tindakan manusia yang menyimpang dan tidak menyimpang atau salah dan benar, namun keduanya juga memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Etika adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan yang salah dan benar, sedangkan moral adalah nilai dari setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia.² Jadi bisa dipahami dengan jelas bahwasannya etika adalah praktek terhadap refleksi kritis dan memiliki nilai dalam moral yang dapat diwujudkan dengan adanya sikap serta langkah yang mengarahkan pada perilaku yang benar secara individu maupun kelompok.³

Etika adalah sebuah tatanan perilaku seseorang berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu, etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Oleh karena itu. jika dibandingkan moral, etika bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. Di samping etika, dikenal pula istilah moral. Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan adat. Moral selalu diterima dengan ajaran baik-buruk yang umum atau masyarakat. Oleh karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Lebih lanjut, Ya'qub menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan moral adalah sesuai

¹ Alba Roma Triwijaya, *Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun*, (Lampung : Repository Raden Intan, 2018), hlm. 15.

² Marzuki, “Etika Dan Moral Dalam Pembelajaran”, *Jurnal Staff UNY*, 2013, hlm. 4.

³ Beni Ahmad Saebeni dan Abdul Hamid, “*Ilmu Akhlak*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 28.

dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar.⁴

Selain etika dan moral, dalam Islam dikenal pula istilah akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, artinya tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dengan begitu, akhlak pada sikap adalah sikap yang melekat pada seseorang secara spontan yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Para ahli mengemukakan pendapat diantaranya seperti Ibnu Miskawaih (seorang ahli pikir Islam, wafat tahun 241 H), dalam bukunya "Tahzib al-Akhlaq" mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan dan pertimbangan. Selanjutnya Imam al-Ghazali (yang dikenal sebagai al-Hujjatul Islam) dalam kitabnya Ihya 'Ululum al-Din seperti yang dikemukakan oleh Hamzah Yakub mengemukakan bahwa akhlak itu adalah kebiasaan jiwa yang tetap dan terdapat dalam diri manusia yang dengan mudah dan tak perlu untuk menumbuhkan perbuatan-perbuatan dan tingkah laku manusia.⁵

Pada zaman sekarang Etika menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam politik. Dalam pandangan masyarakat, politik memiliki kesan yang kurang baik. Banyak orang yang beranggapan bahwa politik berkonotasi dengan kelicikan, pengkhianatan dan banyak mengandung unsur ambisi kotor. Di balik semua anggapan yang beredar di masyarakat, ada bagian yang cukup menarik dan dapat kita kaji perihal politik. Ada banyak tokoh yang menjelaskan apa itu politik secara umum ataupun secara khusus, tidak sedikit tokoh yang mengaitkan antara politik dengan sebuah konsep disiplin ilmu ataupun sebuah ajaran tertentu seperti agama atau budaya dan lain sebagainya.

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, politik menurut istilah diambil dari Bahasa Inggris yaitu *Politic* yang berarti sikap bijaksana atau berhati-hati dalam bersikap dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata politik juga mempunyai kata turunan seperti politikus atau politisi yang berarti orang yang ahli di

⁴ Abudin Nata, "Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana 2008), hlm 212.

⁵ Abdul Majid, Dian Andayani, "Pendidikan Karakter Perspektif Islam", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 8.

dalam bidang politik atau orang yang bergelut di bidang politik.⁶ Politik sering juga disebut sebagai kekuasaan.

Pada saat ini banyak penguasa yang semestinya menggunakan kekuasaannya demi kebaikan bersama namun pada kenyataannya sering digunakan untuk kepentingan pribadi atau lainnya. Hakikat seorang penguasa adalah raja yang harus memimpin rakyatnya sekaligus membimbing mereka. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa haruslah etika dipakai dalam menjalankan politik supaya politik dalam pemerintahan berjalan dengan lebih baik.

Etika dalam politik merupakan norma atau sebuah aturan tentang pemikiran yang diambil dari pemerintahan.⁷ Etika politik bertujuan untuk membina orang-orang agar menuju kearah yang lebih, sekaligus membangkitkan kembali hukum-hukum yang memberatkan salah satu pihak. Menanggapi hal politik tidak lepas dari pengambilan putusan untuk kemaslahatan orang banyak maka dari itu etika dalam politik pun harus dikuasai agar pengambilan keputusan menjadi sebuah kemaslahatan bukan kemadharatan. Terlebih lagi, etika sangat diperlukan bagi para politikus agar setiap keputusan yang diambil tidak mementingkan golongan atau pribadi serta pihak-pihak tertentu. Seorang penguasa yang mengamalkan etika dalam berpolitik adalah seorang pemimpin yang memiliki keutamaan moral yang jauh lebih baik.⁸

Dari dulu hingga sekarang, politik dalam agama Islam memiliki persoalan yang rumit dan mencolok dalam setiap perkembangannya. Terbukti pada masa sepeninggalan Rasulullah, persoalan yang timbul bukan persoalan keyakinan namun persoalan politik.⁹ Bahkan setelah wafatnya beliau, perang antar suku yang diakibatkan oleh konflik karena perebutan jabatan yang ditinggalkan Rasulullah hampir terjadi. Dalam politik Islam, etika mempunyai peran untuk setiap pengambilan keputusan terhadap sebuah persoalan agar tidak adanya pihak yang merugi dan diuntungkan. Etika dalam politik Islam digunakan dalam memilih seorang pemimpin negara yang ditinggalkan oleh Rasulullah Saw., secara objektif. Hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah Saw., tentang memilih seorang pemimpin :

⁶ Burhanuddin Yusuf, *Politik Dalam Islam : Makna, Tujuan, Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)*, Jurnal Aqidah-Ta, 2018, Vol IV, No 1, 2018, hlm.117.

⁷ Rashda Diana dkk, Etika Politik Dalam Perspektif al-Mawardi, *Jurnal Tsaqafah* : Vol 14, No 2, 2018, hlm. 366.

⁸ Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 92.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّيَ مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ (صحيح مسلم : ٤٣٩٩)

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad Telah menceritakan kepada kami Shalih bin Kaisan dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah dia berkata: Pada suatu hari, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sakit, beliau berkata kepada saya: Panggillah Ayahmu Abu Bakr dan saudara laki-lakimu ke sini, agar aku buatkan sebuah surat (keputusan khalifah). Karena aku khawatir jika kelak ada orang yang ambisius dan berkata: Akulah yang lebih berhak menjadi khalifah. Sementara Allah dan kaum muslimin tidak menyetujuinya selain Abu Bakr.”¹⁰ (Shahih Muslim: 4399).

Dalam hadis diatas Rasulullah menginginkan Abu Bakar sebagai pemimpin berikutnya karena Abu Bakar mempunyai potensi lebih di bandingkan yang lainnya dalam menjadi pemimpin. Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya karena beliau mengetahui apa yang akan terjadi jika umat Islam di pimpin oleh orang yang hanya ingin mempunyai jabatan akan tetapi tidak memiliki kelebihan khusus dalam hal memimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai kekuatan untuk meggerakan dan memajukan ummatnya, maka dari itu seorang pemimpin tidak boleh mementingkan diri sendiri dan tidak boleh mengambil apa yang bukan haknya.

Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya tentang anjuran menjadi pemimpin :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي دَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا دَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمَرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ (صحيح مسلم: ٣٤٠٥)

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim keduanya dari Al Muqri'i, Zuhair berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin

¹⁰ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mugni li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1998), h. 1301.

Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub dari Ubaidullah bin Abi Ja'far Al Qurasyi dari Salim bin Abu Salim Al Jaisyani dari ayahnya dari Abu Dzar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Abu Dzar, sungguh saya melihatmu sangat lemah, dan saya menginginkan untukmu seperti yang saya inginkan untuk kamu. Jangan kamu menjadi pemimpin di antara dua orang dan jangan menguasai harta anak yatim."¹¹ (Shahih Muslim: 3405).

Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang lemah dalam hal memimpin, janganlah menjadi seorang pemimpin, karena jika seseorang yang lemah menjadi seorang pemimpin maka akan terjadi kemunduran hingga kehancuran dalam suatu kelompok atau negara yang ia pimpin.

Seorang pemimpin mempunyai kedudukan yang sangat dihormati dan tentu saja kedudukannya pun diinginkan oleh banyak orang dan diperebutkan. Perebutan akan kekuasaan sering kali menuju pada konflik yang dapat mengakibatkan terjadinya perang hingga hancurnya sebuah negara hingga pemimpin tersebut tidak lagi dihormati oleh rakyatnya.¹² Sebuah negara disebut besar atau tidaknya dapat dilihat dari kekuatan masyarakat dan pendukung yang begitu besar.

Oleh sebab itu, umat muslim dalam melakukan politik hendaklah berpegang kepada prinsip-prinsip etika politik Islam dengan menggunakan Alquran dan Hadis sebagai pedoman dalam etika politiknya. Alquran merupakan sumber utama bagi umat muslim dalam melakukan setiap tindakan dan membatasi perihal sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Namun, jika kita hanya menelan mentah-mentah apa yang ada di dalam Alquran maka hal tersebut akan menjadi kesalahpahaman dalam mempelajari sesuatu. Seperti dalam hal sholat, di dalam Alquran kita hanya diperintahkan untuk melaksanakannya, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Maka dari itulah Hadis muncul sebagai penjelas Alquran dan menjadi pedoman kedua bagi umat muslim dalam mempelajari agama Islam.

Penelitian proposal ini dilatarbelakangi oleh keadaan politik saat ini yang memiliki kesan negative di pandangan masyarakat, hal ini terjadi karena politik berkonotasi dengan kelicikan, pengkhianatan dan ambisi dalam menginginkan kekuasaan tanpa melihat baik dan buruk atas tindakannya. Maka dari itu, politik membutuhkan etika agar dalam segala tindakan politiknya tidak menyebabkan pandangan buruk dari

¹¹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab Muslim Bab Anak Yatim, No. 3405, dalam Lidwa Pustaka, *Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam*, aplikasi program hadis, versi 2010.

¹² Darsul S. Puyu, Paradigma Fiqh al-Hadis Terhadap Perilaku Politik Kontemporer, *Jurnal Al-Qalam*, Vol 22, No 1, 2016, hlm. 125.

masyarakat. Politik yang digunakan kepada masyarakat dapat memberikan kesan yang baik dengan memberikan pemahaman etika politik Islam dan menerapkan kembali living hadis dalam melakukan politik di tengah masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menjalankan sunnah Rasulullah saw. Dan sebagai salah satu pendoman bagi umat muslim dalam berpolitik.

Dari latarbelakang di atas maka peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian tentang, bagaimana “**Studi Tematik Hadis-Hadis Tentang Etika Politik Islam**”. Oleh karena itu penulis akan menguraikan rumusan masalah dbawah ini.

B. Rumusan Masalah

Dalam hadisnya Rasulullah mencontohkan tentang cara berpolitik yang beretika, akan tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahui dan tidak mencontoh terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari itu muncul pertanyaan terkait permasalahan yang ada disekitar diantara lain :

1. Apa saja hadis-hadis tentang Etika Politik Islam?
2. Bagaimana Etika Politik dalam meraih, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan menurut hadis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban-jawaban atas masalah yang telah dirumuskan di atas. Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui hadis-hadis tentang etika politik Islam
2. Mengetahui etika politik dalam meraih, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan menurut hadis

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini, diantaranya :

1. Segi Teoritis : Memberikan pembaharuan dalam menjelaskan hadis dengan menggunakan pendekatan tematik terkait etika politik Islam dan penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan dalam bidang kajian hadis yang bersifat ilmiah.
2. Segi Praktis : Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan dan menghidupkan kembali hadis terkait pemahaman etika politik Islam beserta konsepnya ditengah masyarakat luas.

E. Kerangka Pemikiran

Alquran dan hadis adalah pedoman dan juga landasan bagi setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan, karena di dalamnya terdapat berbagai macam aturan baik itu sesuatu yang berhubungan dengan aturan dunia maupun dengan akhirat.¹³ Dalam Alquran dan Hadis memberikan berbagai petunjuk dan pengajaran serta aturan untuk kehidupan, misalnya kehidupan manusia dalam ruang sosial yang tidak lepas dari aturan dan etika serta kehidupan berpolitik. Alquran dan Hadis sebagai standar kebenaran dalam setiap tindakan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah swt. Penerapan tindakan berdasarkan Alquran akan membentuk pribadi yang mulia. Di antara tindakan yang dapat kita ambil dari Alquran dan Hadis adalah etika dan politik.¹⁴

Di dalam keterkaitannya, seorang tokoh yang bernama Bartens berpendapat bahwa etika di ambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata *ethos* yang dalam artian tunggalnya yaitu kebiasaan, adat istiadat atau juga peringai. Sedangkan dalam artian jamaknya berasal dari kata *ethos* dan *ta etha* yang berarti adat kebiasaan.¹⁵

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo politik ialah berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam sebuah sistem politik atau (negara) yang bersangkutan dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem dan menjalankan tujuan-tujuan tersebut. Antara kaitan etika dengan politik, dalam filsafat politik terdahulu mempertanyakan perihal masalah nilai etika, pertanyaannya berupa abstraksi moral yang bersumber dari usaha manusia untuk memaknai hidup dengan ajaran yang lebih baik dan pasti.¹⁶ Secara umum Islam memiliki prinsip-prinsip etika berpolitik, sebagaimana terdapat dalam Alquran dan Hadis, kaitannya ialah menjaga hubungan antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin.

Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus memegang teguh seluruh ajarannya, baik itu dari Alquran maupun Hadis. Di dalam agama Islam terdapat pegangan atau prinsip hukum etika didalam agama Islam, diantaranya:¹⁷

1. Prinsip kepemimpinan sebagai amanah

Dalam pengertian lain amanah diartikan sebagai “tenang dan tidak takut”. Jika diartikan dalam kata sifat, maka itu mengandung pengertian “segala sesuatu yang

¹³ Jalaludin Rahmat ”Pemahaman Hadis: Perspektif Historis” dalam Jurnal *Al-Hikmah*, Bandung, 17, Vol. VII, Tahun 1996, 24.

¹⁴ Hasbi al-Siddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999).

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Tahun 2016-2020).

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61

¹⁷ Jubair Sitomorang, *Etika Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 58.

dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman”. Dalam ruang lingkup pemerintahan negara, maka kata tersebut bisa diartikan bahwa hal itu adalah sebuah pendelegasian atau kewenangan yang melimpah dan juga karena hal itulah dikatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah mandat yang berasal dari Allah swt.

2. Prinsip musyawarah

Musyawarah dapat diartikan sebuah forum untuk bertukar pikiran dan pendapat, di dalamnya termasuk saran-saran yang diajukan untuk memecahkan sebuah masalah sebelum diputuskannya sebuah perkara. Dalam hal ini, musyawarah adalah upaya untuk mencari pandangan yang objektif dalam sebuah perkara, sehingga dapat ditemukan hasil yang sesuai ataupun mengandung resiko yang kecil.

3. Prinsip keadilan

Didalam Alquran dan Hadis, prinsip ini adalah salah satu prinsip yang sangat penting. Maka dari itu bisa dilihat bahwa Allah sendiri memiliki sifat yang Maha Adil. Di dalam agama Islam, keadilan berarti adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu juga adalah salah satu nama Allah. Sebagaimana yang dikutip Abd. Muin dari Al-Syaukani dan berpendapat bahwa keadilan ialah menyelesaikan suatu perkara dengan berdasarkan agama Islam atau sesuai dengan Alquran dan Hadis, bukan hanya menetapkan dan memakai hukum dengan pikiran saja.

4. Prinsip persamaan

Islam adalah agama yang tidak mengenal perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan hal itu berarti bahwa manusia adalah sama yang merupakan suatu kriterium serta memiliki kedudukan yang sama. Hal itulah yang disebut dengan prinsip kesamaan.

5. Prinsip perdamaian

Tentu saja Islam adalah agama yang mencintai perdamaian, maka dari itu haruslah dalam prinsip etika politik Islam mencintai perdamaian ini sangat diperlukan.

Maksud dari etika politik dalam Islam adalah tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip diatas dan selebihnya menghormati setiap hak asasi manusia sehingga dapat menciptakan sebuah kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma agama.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa referensi yang sebelumnya telah ditulis dan berkaitan satu sama lain yaitu tentang “Etika Politik Islam”.

1. Buku yang ditulis oleh Katimin (2018) yang diterbitkan oleh Perdana Publishing yaitu yang berjudul “*Hadis-Hadis Politik*”, buku ini berpendapat mengenai hadis-hadis yang membahas terkait pembahasan politik melalui sudut pandang sosial berdasarkan perspektif hadis, dimana aspek politik sering dibenturkan secara *wajhan bi wajhin* dengan agama sehingga mucullah konsep tertentu yang memisahkan antara politik dan agama. Hadis-hadis nabi SAW sebagai salah satu bagian dari literatur agama yang dijadikan sebagai dasar pandangan hukum dan pedoman atau bahkan gaya hidup cenderung di biarkan tidak menyentuh isu-isu politik yang berkembang. Implikasi ini membuat hadis tetap melangit dan politik tetap membumi secara liar tanpa tuntunan. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yakni buku ini hanya mengumpulkan hadis-hadis tentang politik, sedangkan didalam penelitian yang diteliti oleh penulis hanya hadis tentang etika dalam berpolitik dan dikaji lebih dalam. Meski sama dalam hal politik namun terdapat perbedaan yang menonjol dalam pengkajiannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Alba Roma Triwijaya (2018) diterbitkan repository radenintan yang berjudul “*Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun*”, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) penelitian yang diarahkan dan di fokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah dan yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum dari kedua tokoh islam untuk mengulas etika politik dalam perspektif agama. Berbeda dengan penelitian diatas yang dibuat penulis, skripsi Alba Roma ini memakai pemikiran tokoh yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun namun memakai hadis yang berbeda dengan hadis yang dipakai oleh penulis, hadis yang dipakai oleh Ibnu Khaldun secara khusus mengarahkan politik pada kemashlahatan dan pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat. Sedangkan penelitian diatas yang diteliti oleh penulis tadi memakai banyak hadis dan lebih meneliti hadis secara tematik.
3. Artikel yang ditulis oleh Burhanuddin Yusuf (2018) diterbitkan oleh Jurnal *Aqidah* yang berjudul “Politik dalam Islam: makna,tujuan dan falsafah (kajian atas konsep era klasik)”, jurnal yang membahas tentang teori-teori dari studi tokoh atau sumber literatur klasik. Sisi lain tentang pembicaraan politik yang dianggap dinamis yang

- perkembangannya searah dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Perbedaannya pada penelitian ini akan membahas etika terlebih dahulu.
4. Artikel yang ditulis oleh M Basir Syam (2015) yang diterbitkan oleh *fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* yang berjudul “Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Di Madinah”, karya ilmiah yang menggunakan pendekatan naskah terhadap Alquran dan Hadis Nabi, serta fakta historis yang telah tertulis oleh beberapa ahli sejarah baik kalangan cendekiawan muslim maupun para penulis orientalis barat, dalam artikel ini membahas perihal politik pada masa kepemimpinan Rasulullah dan terdapat beberapa anjurannya. Perbedaannya dalam penelitian ini akan dibahas hadis-hadis tentang etika politik Islam serta konsep yang akan diterapkan pada zaman sekarang.
 5. Artikel yang ditulis Darsul S. Puyu (2016) diterbitkan oleh jurnal *Al-Qalam* yang berjudul “Paradigma Fiqh Al-Hadits terhadap Prilaku Kontemporer”, artikel yang membahas tentang beberapa pesan nabi yang berhubungan dengan beberapa upaya memperoleh kedudukan atau jabatan dan hal-hal yang dapat merusak pengaturan kenegaraan dalam artikel ini terdapat beberapa hadis Fiqh yang membahas terkait kepemimpinan. Perbedaannya pada penelitian kali ini akan membahas etika berpolitik dalam perspektif hadis dan mengkaji secara lebih mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN. Menjelaskan tentang latar belakang masalah mengenai etika politik islam, menguraikan tentang rumusan masalah, menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan lainnya.

BAB II TINJAUAN TEORITIS. Menjelaskan tinjauan teori tentang studi tematik hadis-hadis tentang etika politik Islam dengan lebih luas. Menjelaskan pengertian etika politik islam, menjelaskan prinsip-prinsip etika politik Islam, menjelaskan pengertian hadis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Menjelaskan kembali metodologi penelitian yang dibahas sebelumnya dengan lebih rinci.

BAB IV Analisis tematik hadis tentang etika politik dalam Islam dan menjelaskan etika politik dalam meraih, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan.

BAB V PENUTUP. Kesimpulan dari apa yang penulis buat mengenai pembahasan dan saran.

